



Tunggu Evaluasi Wali Kota

Data Miskin Segera Jadi Perwal

JOGJA - Ada perkembangan signifikan terkait progres penanganan data warga miskin di Kota Jogja.

Setelah sempat mendapatkan protes dari warga dan anggota DPRD Kota Jogja, data itu sudah sampai meja Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti.

Data itu diserahkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja. Kini, data itu menunggu dievaluasi Haryadi.

Usai mendapatkan evaluasi, data tersebut bakal masuk pembahasan untuk menjadi peraturan wali kota (perwal). Data itu nantinya dipakai sebagai data induk bagi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS).

"Sudah sampai Pak Wali Kota. Apakah ada perubahan atau tidak, kami masih menunggu instruksi selanjutnya," tutur Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja MK

Pontjosiwi diselenggarakan rapat koordinasi penanganan banjir di Balai Kota Jogja kemarin (2/1).

Pontjo mengungkapkan, data yang mereka serahkan kepada wali kota tersebut merupakan data yang sudah diperbaiki. Masukan dari warga yang melapor ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIJ dan Jateng maupun DPRD Kota Jogja sudah ditanggapi. "Sudah ada perbaikan-perbaikan," terang dia.

Masuknya data tersebut, menurut Pontjo, tinggal menunggu waktu untuk menjadi perwal. Kini data itu sedang dalam proses pembahasan oleh tim hukum Pemkot Jogja. "Tunggu saja," ujarnya.

Seperti belajar dari publikasi data yang miskin diakhir 2011 lalu, Pontjo enggan membeberkan jumlah warga miskin sesuai data yang diusulkan untuk menjadi perwal tersebut. Dia menegaskan data pasti baru bisa diakses setelah terbit dalam bentuk perwal.

Sebelumnya Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menerangkan,



Haryadi Suyuti

pengesahan data warga miskin 2012 ini akan dilakukan setelah data tersebut melalui proses validasi. "Secepatnya kalau memang sudah melalui proses, pengesahan akan segera dilakukan," tuturnya.

Bagi warga miskin yang tak terdaftar dalam KMS, Haryadi memastikan mereka masih dapat tercover dana APBD 2012. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ungkapnya, warga yang tak masuk daftar dapat mengakses jaminan kesehatan dengan SKTM.

Penetapan data miskin 2011 menjadi data induk KMS memang molor dari tenggat waktu yang ditetapkan yakni akhir tahun. Salah satu penyebabnya yakni banyaknya protes dari masyarakat dan wakil rakyat terkait data tersebut.

Protes yang diajukan di antaranya ada warga yang ternyata miskin namun tidak masuk dalam data. Bahkan Komisi D DPRD Kota Jogja yang membidangi kesejahteraan sosial langsung turun memonitor perkembangan data warga miskin. (eri/amd)

data miskin masih dalam proses menjadi perwal. Selama proses berlangsung, tegas dia, warga pemegang KMS masih bisa menggunakan KMS 2011.

"Yang tidak masuk dalam data KMS bisa menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)," terangnya.

Haryadi mengungkapkan,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 13 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005